BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah, Perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan hasil keluaran dari daerah tersebut. Peningkatan infrastruktur menjadi tujuan utama dari pemerintahan Indonesia. Infrastruktur sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam meningkatkan nilai konsumsi, meningkatkan produktifitas kinerja dan akses dalam pembukaan lapangan kerja (Haris 2013).

Namun, dalam mendapatkan infrastruktur, pemerintah daerah harus membuat rincian anggaran yang dimasukkan ke dalam kelompok belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk asset tetap terwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina & Rasdianto, 2013 : 34). Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan penyusunan anggaran adalah *line item* dan *incremental budgeting*. Cara penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun perincian jenis pendapatan dan belanja, sehingga setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran.

Akan tetapi, sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mulai melakukan perombakan di dalam proses penganggaran. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja. Anggaran

berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan atau perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (Anggraini & Puranto, 2010 : 54).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal berkaitan dengan perencanaan keuangan dalam jangka waktu yang panjang, utamanya di dalam pemeliharaan asset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Berdasarkan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF), kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang (Kosim 2017). Setiap daerah yang membuat penganggaran belanja modal dalam anggaran belanja, maka diharuskan untuk memiliki komitmen guna untuk menyediakan dana dalam pemeliharaan dan rehabilitasi atas asset tetap yang diperoleh dari belanja modal (Fitriyati 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penleitian dengan judul "**Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar Periode 2015 - 2019**"

B. Permasalahan

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk asset tetap terwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina & Rasdianto, 2013 : 34). Belanja modal Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar semakin meningkat hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang

digunakan memberikan manfaat yang lebih bagi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, belanja pemeliharaan semakin meningkat pula, hal ini menunjukkan bahwa asset yang dimiliki Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki kualitas yang kurang baik karena tidak memberikan manfaat ekonomik di setiap tahunnya. Adapun rincian total belanja modal dan belanja pemeliharaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Rincian Total Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan
2015	Rp. 220.909.880	Rp. 289.765.223
2016	Rp. 253.078.099	Rp. 310.098.000
2017	Rp. 280.002.900	Rp. 349.348.900
2018	Rp. 363.702.580	Rp. 523.569.000
2019	Rp. 800.565.125	Rp. 1.061.947.700

Sumber : Rekening Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa belanja modal Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar semakin meningkat hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang lebih bagi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, belanja pemeliharaan semakin meningkat pula, hal ini menunjukkan bahwa asset yang dimiliki Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki kualitas yang kurang baik karena tidak memberikan manfaat ekonomik di setiap tahunnya. Belanja pemeliharaan yang baik adalah belanja pemeliharaan yang tidak menambah

lamanya waktu atau periode pemakaian asset tetap. Apabila biaya pemeliharaan dialokasikan untuk satu tahun penggunaan, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk satu tahun penggunaan tersebut. Biaya pemeliharaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar diketahui semakin meningkat tiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa siklus anggaran yang digunakan tidak efektif dan terjadi berulang – ulang setiap tahunnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan permasalahan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan : " Bagaimana Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar Periode 2015 – 2019 ? "

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar Periode 2015 – 2019

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

1. Peneliti

   Dengan menerapkan ilmu yang telah di dapat pada saat perkuliahan, penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui bagaimana pengaruh

belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar Periode 2015 – 2019

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan

3. Bagi Pihak Lain

   Diharapkan untuk hasil dari penelitian ini dapat digunakan lagi sebagai referensi dan mendorong timbulnya penelitian selanjutnya.